



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama** : EMA RACHMAWATI
- Jabatan** : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
- NHK** : 214735

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.113.050.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/100 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
- Tanah Seluas 261 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 913.050.000
- Tanah Seluas 267 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
- Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 401 m2/401 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **268.000.000**

- MOTOR, HONDA ACB2J21B02 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
- MOTOR, HONDA ACB2J22B03 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
- MOTOR, HONDA X1HO2N32I.1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
- MOBIL, HONDA JAZZ GK 1.5 RS CVT (CKD) Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **136.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	531.628.013
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.048.678.013
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.048.678.013

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.